

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Tanuwijaya Nomor 7 Tasikmalaya, Telp. (0265) 336438 Fax. (0265) 336438
E-mail : kesbang@tasikmalavakab.go.id Website : kesbang.tasikmalavakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Adapun penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-lima pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024, wujud akunabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan laporan capaian kinerja ini, sehingga Kami berharap laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga Kami mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua

Tasikmalaya, Februari 2025
Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA

ASEP GUNADI, A.Md., S.Sos.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19660929 198710 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bakesbangpol	2
1.3 Aspek Kepegawaian Dan Sarana Prasarana	5
1.4 Isu Strategis	8
1.5 Sistematika Penyusunan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis 2021-2026.....	11
2.2 Rencana Kerja 2024 dan Perubahan Rencana Kerja 2024.....	12
2.2.1 Rencana Kerja 2024.....	12
2.2.2 Perubahan Rencana Kerja 2024.....	13
2.3 Perjanjian Kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya	18
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	40
3.3 Prestasi/ Penghargaan yang Diraih Bakesbangpol.....	43
BAB IV PENUTUP.....	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Berdasarkan Status Kepegawaian	5
Tabel 1.2 Saran Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 202..	47
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM 2021-2026.....	12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	13
Tabel 2.3 Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	14
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	15
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	17
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	18
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	19
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	21
Tabel 3.4 Data Potensi/Kejadian Konflik Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	22
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	25
Tabel 3.7 Jumlah Potensi/Kejadian Konflik Berdasarkan Latar Belakang di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2024	25
Tabel 3.8 Perbandingan capaian target kinerja Bakesbangpol Tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra.....	26
Tabel 3.9 Tabel Perbandingan Capaian Sasaran dengan OPD yang Sejenis ..	27
Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1	30

Tabel 3.11 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesbangpol Tahun 2024 Per Unsur Layanan	35
Tabel 3.12 Target Capaian Renstra Bakesbangpol Tahun 2021-2025	36
Tabel 3.13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2	38
Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Program TA. 2024 Badan Kesbangpol	41
Tabel 5.1 Realisasi Capaian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2024.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Stuktur Organisasi.....	4
Gambar 1.2 Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Status Kepegawaian.....	5
Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Berdasar Tingkat Pendidikan.....	6
Gambar 1.4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.....	7
Gambar 3.1 IKM Badan Kesbangpol tahun 2024 Per Unsur Layanan	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan WaliKabupaten Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya;
2. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bakesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan ini tentunya bukan hanya sekedar perubahan nomenklatur saja, namun berkaitan dengan hal-hal yang bersifat esensi seperti peningkatan kinerja. Berubahnya status kantor menjadi badan, membuat struktur organisasi menjadi lebih gemuk, artinya dukungan personil bertambah dan beban kerja bisa dibagi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan beban kerja.

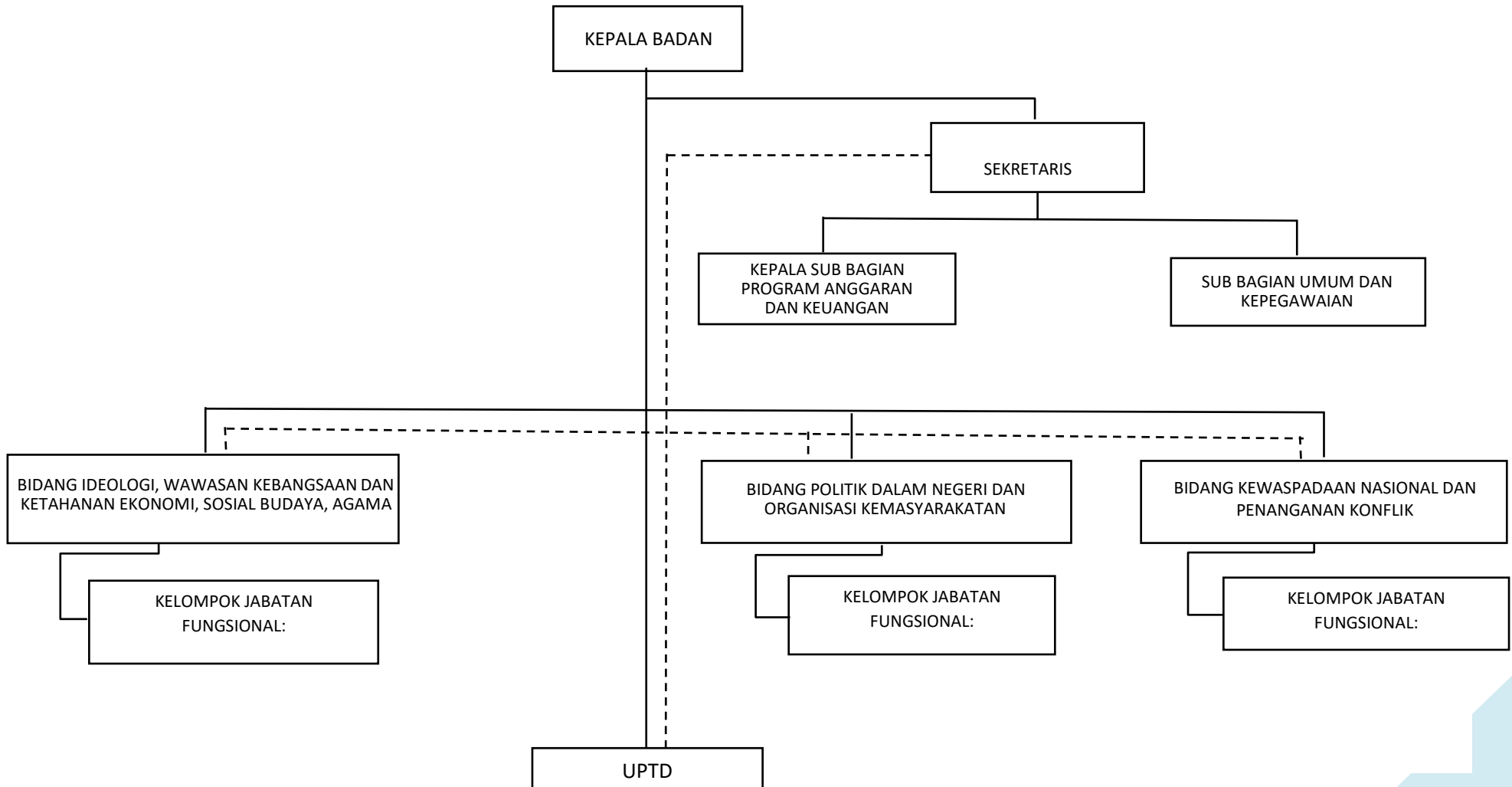
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tersebut kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Di mana dalam Pasal 86 Perbup nomor 39 ini disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, membina mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi penyelenggaraan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik serta pembinaan unit pelaksana teknis daerah.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang.

Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang terdiri dari Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan serta Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Struktur Organisasi tersebut digambarkan sebagai berikut

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN



1.3 Aspek Kepegawaian Dan Sarana Prasarana

Susunan Kepegawaian

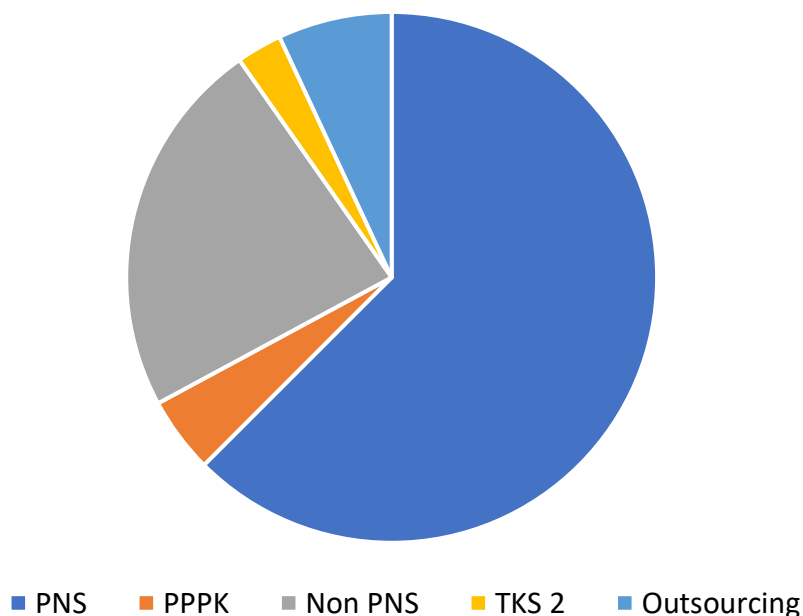
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki jumlah pegawai sebanyak 44 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
Berdasarkan Status Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	27 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK)	2 orang
Non PNS	10 orang
Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	2 orang
<i>Outsourcing</i>	3 orang
Jumlah	44 orang

Komposisi pegawai tersebut bisa dilihat dalam gambar sebagai berikut:

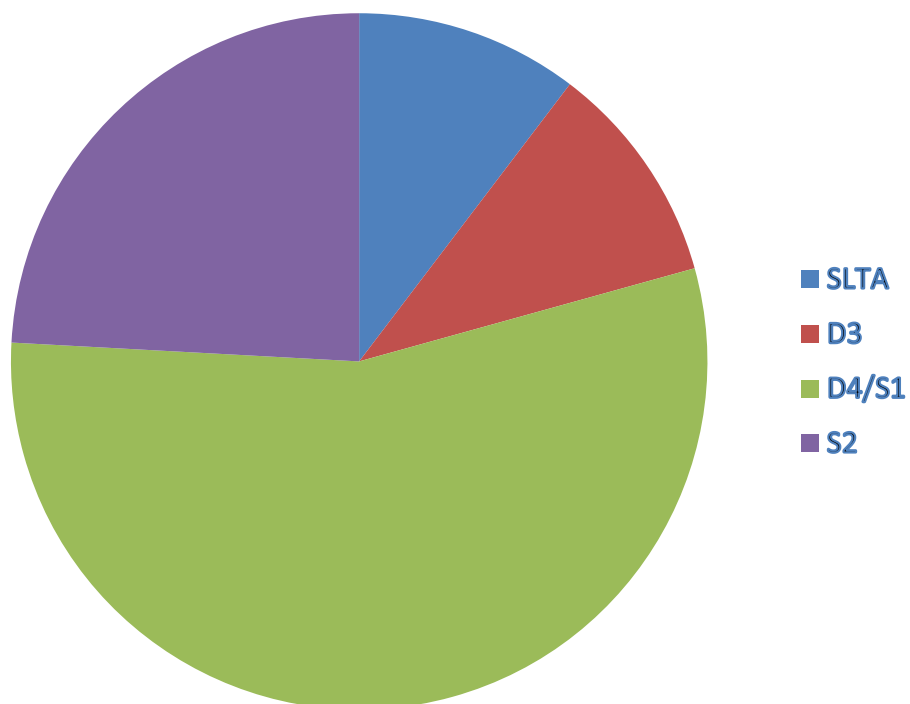
Gambar 1.2
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Status Kepegawaian



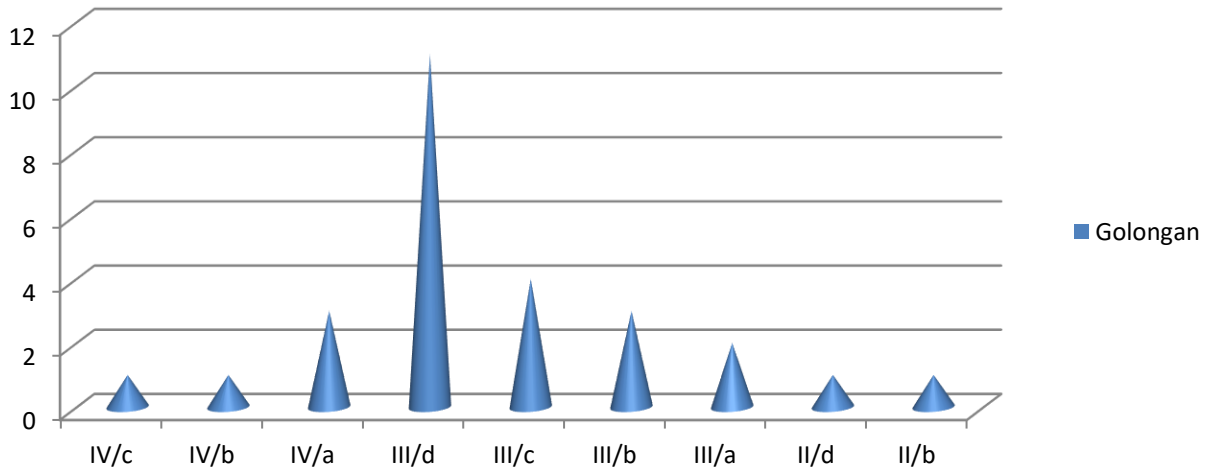
Menurut hasil penelitian, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkorelasi positif terhadap kinerja suatu organisasi, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM perlu senantiasa dilakukan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penambahan kemampuan teknis manajerial baik melalui jalur pendidikan formal (swadana atau beasiswa) maupun melalui kegiatan pendidikan latihan (diklat) teknis ataupun fungsional.

Berdasar jenjang pendidikan, di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya saat ini sebagian besar telah menempuh pendidikan sarjana, dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 1.3
Komposisi Pegawai Negeri Sipil
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
Berdasar Tingkat Pendidikan



Gambar 1.4
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024



Susunan Perlengkapan

Perlengkapan sebagai 'perangkat keras' suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi. Saat ini perlengkapan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2
Saran Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5
2.	Sepeda Motor	9
3.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
4.	Rak Besi / Metal	6
5.	Filling Besi / Metal	7
6.	Band Kas	1
7.	Alat Penghancur Kertas	1
8.	Mesin Absensi	1
9.	Hecmaching Besar	1
10.	Meja Panjang	1

11.	Meja Rapat	6
12.	Kursi Tamu	2
13.	Kursi Putar	2
14.	Kursi Lipat	40
15.	Televisi	1
16.	Wireless	1
17.	Wireless Portable	1
18.	Stabilisator	2
19.	Camera Film	2
20.	Tustel	2
21.	Lambang Garuda Pancasila	1
22.	Handy Cam	2
23.	P.C Unit	5
24.	Lap Top	8
25.	Note Book	4
26.	Printer	10
27.	Modem	4
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3
29.	Audio Video Selector	1
30.	Telephone (PABX)	1
31.	Infocus	1
32.	Lemari Arsip	1
33.	Kursi Tunggu	5
34.	Tablet Samsung	1

1.4 Isu Startegis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, antara lain sebagai berikut:

1. Potensi konflik berlatar belakang ideologi, sosial politik hampir muncul tiap tahun di Kabupaten Tasikmalaya;
2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial;

3. Belum optimalnya peran ormas dalam pelaksanaan pembangunan di daerah;
4. Meningkatnya ancaman terhadap ketahanan bangsa berupa proxy war (paham anti Pancasila, narkoba, hoax, radikalisme, isu SARA);
5. Masih rendahnya pendidikan politik terhadap masyarakat.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi. Bab pendahuluan terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bakesbangpol
- 1.3 Aspek Kepegawaian Dan Sarana Prasarana
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Sistematika Penyusunan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

- 2.1 Rencana Strategis 2021-2026
- 2.2 Rencana Kerja 2023 dan Perubahan Rencana Kerja 2023
 - 2.2.1 Rencana Kerja 2023
 - 2.2.2 Perubahan Rencana Kerja 2023
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Memasuki Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya menggunakan dasar pelaksanaan kegiatan dengan acuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2021-2026).

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur pimpinan, pejabat dan staf serta pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan Renstra telah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya tercantum pada Misi kedua yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan secara langsung dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Data Existing	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kondusifitas daerah	Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	83,30	83,70	84,05	84,65	84,90	85,10
		Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Perangkat Daerah	Predikat SPIP	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)

2.2 Rencana Kerja 2024 dan Perubahan Rencana Kerja 2024

2.2.1 Rencana Kerja 2024

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Rencana kerja disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Target indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Persentase potensi dan kejadian konflik terkait ipoleksosbudhankam yang tertangani	Jumlah potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
2.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	84,65

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan seperti di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 akan melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 11 kegiatan serta 31 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 128.637.837.340 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Riga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.

2.2.2 Perubahan Rencana Kerja 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 161 terkait perubahan anggaran, bahwa perubahan anggaran dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan atau antar rincian obyek belanja.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan berlandaskan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta

dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2024 Triwulan II dan mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun berjalan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya melakukan penyesuaian target indikator kinerja utama pada perubahan rencana kerja Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perubahan Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU sesuai Renja 2024	Target Kinerja IKU sesuai Perubahan Renja 2024
1.	Persentase potensi dan kejadian konflik terkait ipoleksosbudhankam yang tertangani	Jumlah potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%
2.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70	68
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	84,65	80

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 11 kegiatan serta 31 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 139.423.867.673 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.

2.3 Perjanjian Kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan standar Pelayanan	Predikat SAKIP Perangkat daerah	B (70)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	84

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Rp. 5.506.278.197	
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.800.000.000	
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 89.491.159.143	
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 12.187.000.000	
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 1.720.000.000	
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 17.933.400.000	
	JUMLAH	Rp. 128.637.837.340	

Adanya perubahan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2024, sehingga harus diikuti dengan penyusunan perjanjian kinerja perubahan seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan standar Pelayanan	Predikat SAKIP Perangkat daerah	B (68)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	84

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.609.728.197	
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3.536.000.000	
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 90.148.489.476	
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 18.327.000.000	
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 2.289.250.000	
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 19.513.400.000	
	JUMLAH	Rp. 139.423.867.673	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu aspek dalam penyelenggaraan SAKIP adalah pelaporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

3.4 Capaian Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Badan Kesbangpol
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	Baik
2	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	68			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	84	84,04	100.04%	Sangat Baik
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja					100,2%	Sangat Baik

Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 belum dapat diukur karena masih dalam proses penilaian. Sedangkan dari tabel di atas, berdasarkan 2 indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang diukur berdasarkan 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai sebesar **100,2%** maka capaian kinerja dikategorikan "**Sangat Baik**".

Secara lebih rinci, evaluasi dan analisis terhadap capaian indikator perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah "Persentase potensi dan kejadian konflik terkait ipoleksosbud yang ditangani".

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase potensi dan kejadian konflik terkait ipoleksosbud yang ditangani	%	100	100	100	100

Capaian sasaran kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 seperti pada tabel di atas, dapat dideskripsikan sebagai berikut.

- 1) Tertanganinya potensi dan kejadian konflik terkait ipoleksosbud di Kabupaten Tasikmalaya

Persentase potensi/kejadian konflik terkait poleksosbud yang dimediasi dapat dilaksanakan dengan capaian 100%. Penghitungan persentase tersebut didapat dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah konflik yang ditangani}}{\text{Jumlah laporan konflik yang masuk}} \times 100\%$$

Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Menurut undang-undang ini, dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada bhineka tunggal ika, keadilan, esetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum. Juga mencerminkan keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membedakan.

Tujuan Penanganan Konflik Sosial, menurut Pasal 3 undang-undang ini, adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai

dan sejahtera. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Dengan meningkatnya intensitas permasalahan dan adanya kejadian-kejadian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di Kabupaten Tasikmalaya telah diinventarisir beberapa permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yaitu permasalahan yang berlatar belakang Ideologi, Agama, Ekonomi, Politik, Sosial, Hankam dan Budaya. Berdasarkan data dari Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, Pada tahun 2024, konflik yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya mayoritas adalah konflik sosial dengan 176 kejadian dan diurutan kedua adalah konflik politik dengan 108 kejadian. Lebih jelasnya laporan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 berdasarkan jenis konflik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Data Potensi/Kejadian Konflik Di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2024

No	Jenis Konflik	Jumlah
1	Ideologi	18
2	Agama	3
3	Ekonomi	11
4	Politik	108
5	Sosial	176
6	Hankam	8
7	Budaya	6
	Jumlah	330

Dari 330 kasus potensi/kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya, semua kasus tersebut bisa ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga indikator capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan sebagai berikut.:

330 (potensi/kejadian konflik)	x 100%
330 (potensi/konflik yang dimediasi)	

Seluruh laporan kejadian konflik yang terjadi selama tahun 2024 berhasil ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Penanganan laporan potensi/kejadian konflik dilakukan dalam bentuk mediasi, konsiliasi, subjugasi/dominasi, kompromi, intergrasi maupun bentuk penyelesaian konflik lainnya.

1) Perbandingan Capaian Persentase Potensi Dan Kejadian Konflik yang tertangani Tahun 2024 dengan Target

Target penanganan potensi/kejadian konflik sosial di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 adalah 100%. Target ini ditetapkan atas dasar seluruh potensi dan kejadian konflik sosial yang ada di Kabupaten Tasikmalaya harus dapat ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penanganan laporan potensi/kejadian konflik dapat dilakukan dalam bentuk mediasi, konsiliasi, subjugasi/dominasi, kompromi, intergrasi maupun bentuk penyelesaian konflik lainnya.

Capaian penanganan potensi/kejadian konflik sosial di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 adalah 100%. Penghitungan persentase tersebut didapat dengan rumus:

Jumlah konflik yang ditangani	x 100%
Jumlah laporan konflik yang masuk	

Di mana pada tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya terjadi 300 kejadian konflik dan semua tertangani. Sehingga indikator capaian kinerja mencapai 100%. Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan sebagai berikut.:

$$\frac{330 \text{ (potensi/kejadian konflik)}}{330 \text{ (potensi/konflik yang dimediasi)}} \times 100\%$$

Target dan capaian sasaran strategis persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 thd target akhir
			Target	Realisasi	Persen		
1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100	100	100	100	100	100

2) Analisis penyebab ketidaktercapaian target serta alternatif solusi yang dilakukan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, target kinerja yang ditetapkan untuk sasaran 1, yaitu Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani tercapai. Seluruh potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2024 bisa tertangani walaupun dilihat dari sisi kuantitas, potensi/kejadian konflik tahun 2024 bertambah.

Pada tahun 2023, potensi/kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 148 kejadian dan pada tahun 2024 berjumlah 330. Hal tersebut terutama disebabkan pada tahun 2024 dilaksanakan Pemilihan Umum Serentak, di mana Pemilu tersebut menimbulkan meningkatnya potensi/kejadian konflik terutama yang berlatar belakang politik, ideologi dan sosial.

Namun walaupun dari segi kuantitas bertambah, semua potensi dan kejadian bisa tertangani yang dilakukan dalam bentuk mediasi, konsiliasi, subjugasi/dominasi, kompromi, integrasi maupun bentuk penyelesaian

konflik lainnya, sehingga tidak dialami kendala dalam mencapai target sasaran kinerja.

3) Perbandingan capaian Persentase Potensi Dan Kejadian Konflik yang tertangani Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Target sasaran Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang tertangani pada tahun 2023 dan 2024 tercapai 100%. Walaupun dari segi kuantitas jumlah konflik bertambah namun capaian kinerjanya berhasil mencapai 100%, dan terpenuhi sesuai target. Gambaran capaian kinerja sasaran tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	2024			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100	100	100	100	100	100

Adapun data potensi/kejadian konflik dari tahun 2021 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Jumlah Potensi/Kejadian Konflik
Berdasarkan Latar Belakang di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2024

No	Latar Belakang	Satuan	Jumlah			
			2021	2022	2023	2024
1	Agama	kejadian	29	24	8	3
2	Agraria	kejadian	30	18	7	0
3	Etnik/Kampung	kejadian	5	3	2	0
4	Ekonomi	kejadian	4	9	10	11
5	Politik	kejadian	21	13	20	108
6	Sosial	kejadian	109	87	101	176

8	Ideologi					18
9	Hankam					8
10	Budaya					6
Total			198	154	148	330

4) Perbandingan capaian Persentase Potensi Dan Kejadian Konflik yang tertangani Tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra

Capaian sasaran Persentase Potensi Dan Kejadian Konflik yang tertangani Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra sudah tercapai. Target akhir Renstra yaitu sebesar 100% di Tahun 2024 sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini merupakan hasil kerja sama, dan koordinasi antara pemerintah dalam hal ini instansi/perangkat daerah terkait tim penanganan konflik sosial dengan mitra kerja yaitu: *Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)*, *Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)*, *Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)*, *Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)* serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 3.8
Perbandingan capaian target kinerja Bakesbangpol Tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Jumlah potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5) Perbandingan capaian Persentase Potensi Dan Kejadian Konflik yang tertangani Tahun 2024 dengan standar nasional

Capaian kinerja sasaran persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, pasalnya tidak

ada standar nasional pada sasaran kinerja ini. Namun perbandingan capaian kinerja dapat dilakukan dengan OPD lain yang sejenis. Perbandingan ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi yang lebih akurat. Berikut ini disajikan perbandingan indikator, target dan realisasi sasaran strategis dari 2 OPD lain.

Tabel 3.9
Tabel Perbandingan Capaian Sasaran dengan OPD yang Sejenis

No	Nama OPD	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi thd target
1	Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
2	Kesbangpol Kota Yogyakarta	Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Penyelesaian Potensi Konflik Sosial	81%	86,36	106,6%
3	Kesbangpol Kota Pariaman	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	100%	100%	100%

6) Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran

Adapun program dan kegiatan pendukung upaya pencapaian kinerja sasaran ini yaitu di antaranya :

A. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga

- Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa.
- C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
 - d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
 - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

7) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran ini, berikut ditampilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing sub kegiatan :

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Efisiensi
		Rencana	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.536.000.000	3.534.284.950	0,05%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.536.000.000	3.534.284.950	0,05%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.335.000.000	1.334.894.950	0,01%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.150.000.000	2.148.390.000	0,07%

	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	51.000.000	51.000.000	0,00%
II	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	90.148.489.476	90.136.935.339	0,01%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	90.148.489.476	90.136.935.339	0,01%
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	425.000.000	424.450.000	0,13%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.270.459.333	5.270.459.329	0,00%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	83.423.030.143	83.417.789.607	0,01%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.030.000.000	1.024.236.403	0,56%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	18.327.000.000	17.687.510.496	3,49%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.327.000.000	17.687.510.496	3,49%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18.042.000.000	17.407.000.000	3,52%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	285.000.000	280.510.496	1,58%
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.289.250.000	2.248.860.000	1,76%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.289.250.000	2.248.860.000	1,76%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000.000.000	996.605.000	0,34%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.200.000.000	1.188.505.000	0,96%

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	89.250.000	63.750.000	28,57%
V	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	19.513.300.000	19.087.205.000	2,18%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	19.513.300.000	19.087.205.000	2,18%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.030.000.000	1.028.425.000	0,15%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17.275.000.000	16.882.160.000	2,27%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	370.000.000	338.320.000	8,56%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	838.300.000	838.300.000	0,00%
	Jumlah	133.814.039.476	132.694.795.785	0,84%

Sasaran Strategis II
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan
yang sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur dan Standar Pelayanan

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu sasaran rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah. Sasaran ini ditujukan untuk mengukur sejauhmana kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya serta untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan. Namun Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 belum dapat diukur karena masih dalam proses penilaian. Oleh karenanya pada sasaran 2 ini hanya akan diuraikan mengenai indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

1) Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan Target

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

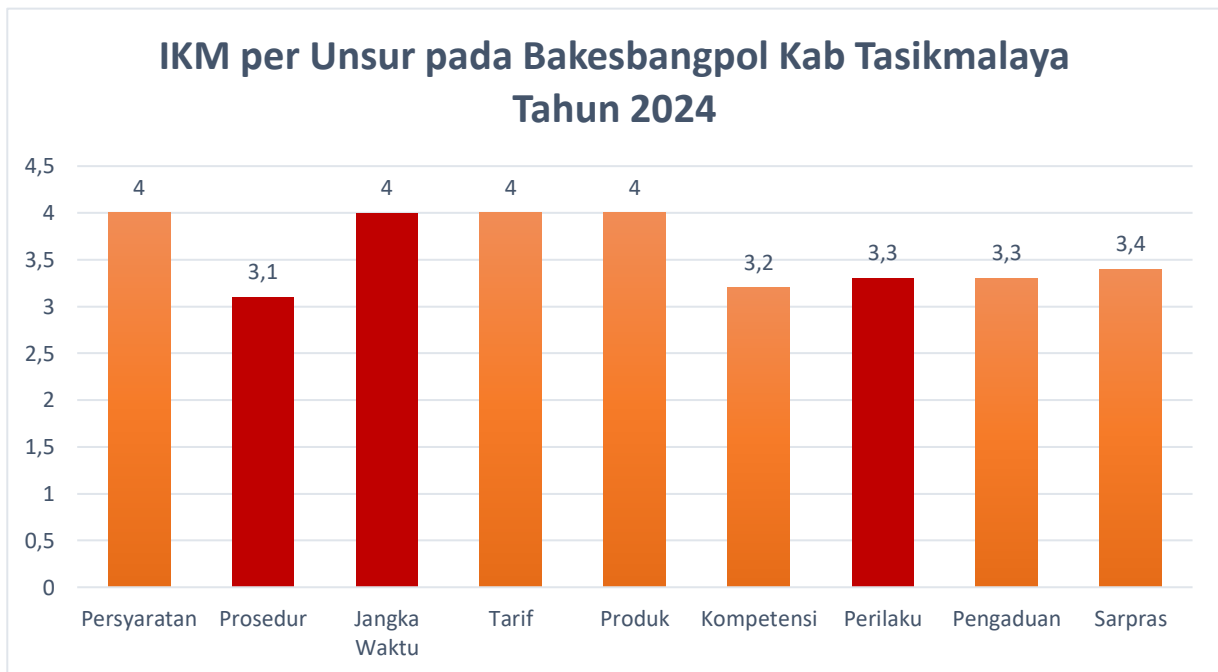
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesbangpol Tahun 2024 adalah 84 poin. Hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesbangpol Tahun 2024 adalah sebesar 84,04 poin. Dan berikut ditampilkan rincian nilai indeks kepuasan masyarakat Badan Kesbangpol Tahun 2024 per unsur layanan :

Tabel 3.11
 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesbangpol Tahun 2024
 Per Unsur Layanan

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur		4	3,1	4	4	4	3,2	3,3	3,3	3,4
Kategori		A	B	A	A	A	B	B	B	B
IKM Layanan	Unit	84,04 (Baik)								

Gambar 3.1
 IKM Badan Kesbangpol tahun 2024 Per Unsur Layanan



2) Analisis penyebab ketidaktercapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat serta alternatif solusi yang dilakukan

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesbangpol Tahun 2024 telah melampaui 84,04 sehingga capaian kinerja sebesar 100.04%.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target kinerja sasaran ini diantaranya:

1. Inovasi kemudahan layanan di mana pengurusan izin KKN bisa dilakukan secara online;
2. Peningkatan sarana dan prasarana, khususnya penataan ruang tunggu;
3. Peningkatan kompetensi petugas layanan melalui bimbingan teknis; dan
4. Kemudahan dalam layanan pengaduan.

3) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesbangpol mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesbangpol adalah sebesar 83,52, sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi 84,04 poin.

4) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra

Capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesbangpol Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra sudah tercapai. Target akhir Renstra yaitu sebesar 71,5 poin sedangkan realisasi di Tahun 2024 sebesar 84,04 poin sehingga capaiannya sebesar 117,53%.

Dengan memperhatikan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesbangpol pada Tahun 2024 yang telah melampaui target akhir Renstra, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target indikator ini dalam rencana kerja Tahun 2025. Target capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Target Capaian Renstra Bakesbangpol Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	70,54	70,74	71	71	71,5	71,5	83,30	83,50	83,52	84,04

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan standar nasional

Capaian kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, pasalnya tidak ada standar nasional pada sasaran kinerja ini. Namun perbandingan capaian kinerja dapat dilakukan dengan OPD lain. Perbandingan ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi yang lebih akurat. Berikut ini disajikan perbandingan indikator, target dan realisasi sasaran strategis dengan RSUD Kyai Haji Zainal Musthafa Kabupaten Tasikmalaya yang memang tugasnya melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat di Bidang Kesehatan. RSUD Kyai Haji Zainal Musthafa Kabupaten Tasikmalaya pada triwulan pertama tahun 2024 adalah 87,95. Memang masih di atas nilan IKM Badan Kesbangpol yang sebesar 84,04.

6) Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran

Adapun program dan kegiatan pendukung upaya pencapaian kinerja sasaran ini yaitu di antaranya :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran ini, berikut ditampilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing sub kegiatan :

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Efisiensi
		Rencana	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.609.728.197	5.396.774.878	3,80%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	69.805.000	0,28%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	19.805.000	0,98%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.054.482.917	3.850.776.472	5,02%

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.054.482.917	3.850.776.472	5,02%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.958.300	656.326.500	0,25%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.309.200	166.759.200	0,92%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.490.000	74.490.000	0,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.159.100	57.159.100	0,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	0,00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	58.000.000	58.000.000	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.000.000	269.918.200	0,03%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.839.980	161.855.006	4,14%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.021.980	26.205.006	20,64%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.818.000	135.650.000	0,12%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusanh Pemerintahan Daerah	608.447.000	608.011.900	0,07%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	310.235.000	309.799.900	0,14%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.000.000	65.000.000	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	233.212.000	233.212.000	0,00%
	Jumlah	5.609.728.197	5.396.774.878	3,80%

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024, Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Mengalokasikan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 139.423.867.673 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 138.091.570.663 atau tercapai sebesar 99,104%. Lebih rinci mengenai komposisi anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

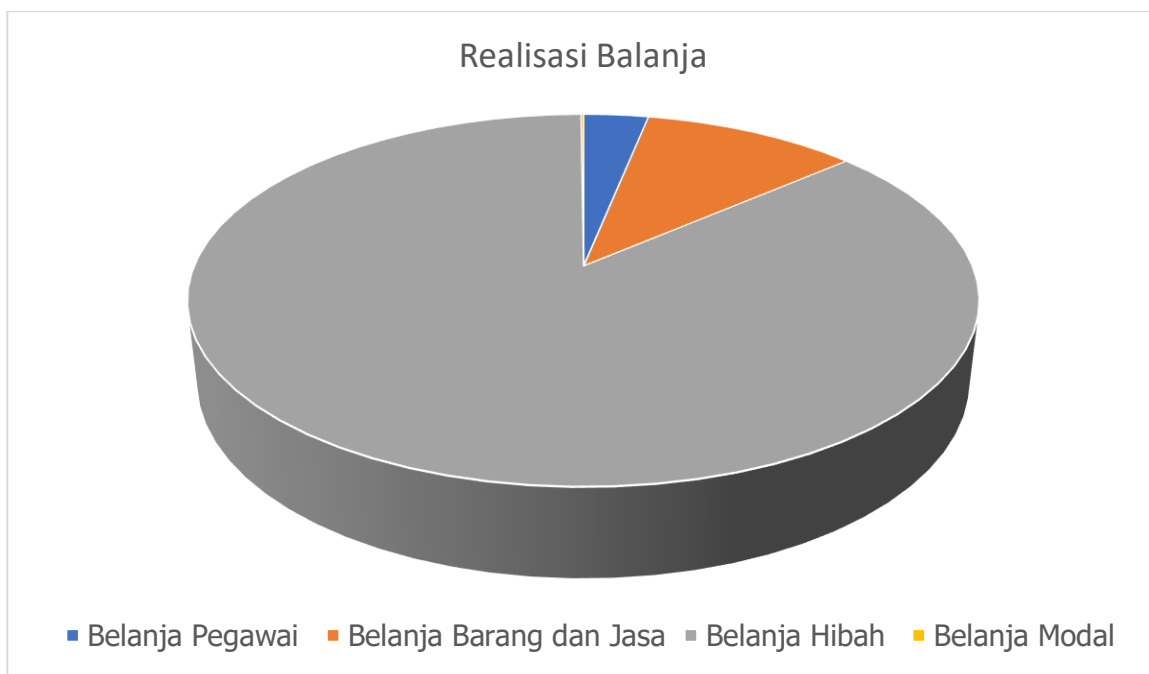
A. BELANJA OPERASI

- 1) Belanja Pegawai Rp. 4.391.082.917 atau 3,15%
- 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.699.982.980 atau 10,5%
- 3) Belanja Hibah Rp. 120.220.489.476 atau 86,22%

B. BELANJA MODAL

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 65.049.300 atau 0,13%

Gambar 3.2
Realisasi Belanja Badan Kesbangpol Tahun 2024



Di bawah ini ditampilkan tabel kesesuaian kinerja sasaran strategis, program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja :

Tabel 3.14
 Anggaran dan Realisasi Program TA. 2024
 Badan Kesbangpol

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program yang mendukung	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Persen	100%	100%	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.536.000.000	3.534.284.950
					PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	90.148.489.476	90.136.935.339
					PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	18.327.000.000	17.687.510.496
					PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2.289.250.000	2.248.860.000
					PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	19.513.300.000	19.087.205.000

2	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	68				
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	84	84,04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.609.728.197	5.396.774.878

3.3 Prestasi/ Penghargaan yang Diraih Bakesbangpol

Selama tahun 2024, belum ada Prestasi/ Penghargaan yang Diraih Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan ke dalam indikator kinerja.

Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024. Dari hasil analisis kinerja diperoleh pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

Tabel 5.1

Realisasi Capaian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	Baik
2	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	68			

3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	84	84,04	100.04%	Sangat Baik
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja					100,2%	Sangat Baik

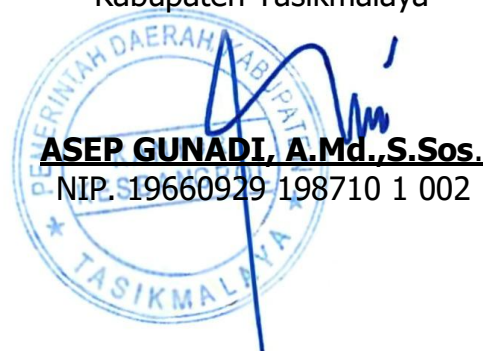
Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 belum dapat diukur karena masih dalam proses penilaian. Sedangkan dari tabel di atas, berdasarkan 2 indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang diukur berdasarkan 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai sebesar **100,2%** maka capaian kinerja dikategorikan "**Sangat Baik**".

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi;
- b. Mengintensifkan pemantauan dan monitoring serta deteksi dini terhadap potensi konflik yang akan terjadi terutama menjelang dan selama Pemilu berlangsung;
- c. Meningkatkan kualitas layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Februari 2025
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya


ASEP GUNADI, A.Md., S.Sos.
NIP. 19660929 198710 1 002